

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dilakukan terkait faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan kredit diantaranya yaitu Pratama (2010). Melakukan penelitian tentang analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum Indonesia Periode Tahun 2005 – 2009). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh DPK, CAR, NPL dan suku bunga SBI terhadap kredit perbankan. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, sedangkan suku bunga SBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

Hasanudin dan Prihatiningsih (2010) melakukan penelitian analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat suku bunga kredit, *Non performing Loan* (NPL), dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah. Objek penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Jawa Tengah ada 330 BPR dan dari seluruh objek penelitian maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20% dari total populasi. Hasil dari penelitian ini menunjukknn bahwa Dana Pihak Ketiga

(DPK) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit BPR. Tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, sedangkan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. Tingkat inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit dan risiko kredit berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

Permani (2014), dalam penelitian Analisis Penyaluran Kredit investasi dan Kredit Modal Kerja pada Bank Umum di Indonesia. Penelitian ini mengambil data dari bank umum sebanyak 6 (enam) jenis bank yang berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan dengan menggunakan alat analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran Kredit Investasi maupun Kredit Modal Kerja. Suku Bunga Kredit pada penyaluran Kredit Investasi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pada penyaluran Kredit Modal Kerja berpengaruh negative dan tidak signifikan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada penyaluran Kredit Investasi berpengaruh negative dan tidak signifikan, sedangkan pada penyaluran Kredit Modal Kerja berpengaruh positif dan signifikan.

Oktavia (2014). Dalam penelitiannya Analisis Penyaluran Kredit Konsumsi pada Perbankan di Indonesia tahun 2004 – 2010 menggunakan objek penelitian mencakup variable Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) pada Perbankan

di Indonesia Tahun 2004 – 2010. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan penyaluran kredit konsumsi di Indonesia tahun 2004 – 2010 dan menganalisis Dana Pihak Ketiga (DPK), *Current Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Kredit Konsumsi di Indonesia Tahun 2004 – 2010. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa analisa data yang dilakukan secara serentak menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit konsumsi.

Keterkaitan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sama – sama mengamati faktor – faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit, namun perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah tahun penelitian yaitu tahun 2007 – 2016 dan objek penelitian yang digunakan adalah Bank Pemerintah yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, maupun transaksi lainnya. Menurut Undang – Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang luas. Pengertian yang lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga jika berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Bank juga dapat diartikan suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman terutama jangka pendek, serta menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayarannya (Subagyo dkk, 2002)

Praktik perbankan di Indonesia pada saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang telah diatur dalam undang – undang perbankan. Melihat dari jenis perbankan sebelum keluar undang – undang nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu undang – undang nomor 14 tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan namun kegiatan utama atau kegiatan pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lain. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank. perbedaan fungsi yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya.

Jenis – jenis bank ditinjau dari segi fungsinya antara lain :

a. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank – bank yang ada di dalam suatu Negara. Bank Sentral hanya ada satu di setiap Negara dan mempunyai kantor yang hamper di setiap Provinsi. Bank Sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia sesuai dengan undang – undang nomor 23 tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah di Indonesia. Stabilitas nilai rupiah ini sangta penting untuk mendukung perekonomian Negara dan kesejahteraan masyarakat.

b. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasar kepada prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.jasa yang diberikan bersifat umum, dapat diartikan memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umumsering disebut sebagai bank komersil (*Comercial Bank*). Kegiatan Bank Umum secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga :

- 1). Penghimpunan dana dari masyarakat
- 2). Penyaluran dana kepada masyarakat
- 3). Pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kgiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral, fungsi BPR pada umumnya terbatas hanya pada memberikan pelayanan jasa dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Kegiatan BPR antara lain :

- 1). Penghimpunan dana masyarakat
- 2). Penyaluran dana kepada masyarakat
- 3). Tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran

Bank dilihat dari segi kepemilikannya, artinya siapa yang dapat memiliki bank tersebut, hal ini dapat dilihat dari akta pendiriannya dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya antara lain :

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah. Bank pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah. Akta pendirian bank pemerintah tertuang jelas

bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakilkan oleh menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi.

b. Bank Swasta Nasional

Bank Swasta Nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu maupun lembaga sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta, sebaliknya apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak swasta.

c. Bank Milik Koperasi

Bank Milik Koperasi didirikan oleh perusahaan perbankan yang berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia terdapat satu bank yang menjadi milik koperasi yaitu Bank Bukopin.

d. Bank Asing

Bank Asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank Asing yang ada di Indonesia merupakan cabang atau perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negaranya masing – masing. Modal yang dimiliki adalah dari pemerintah asing atau swasta asing

sehingga keuntungan akan menjadi milik Negara Asing atau orang asing

e. Bank Campuran

Bank Campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Pemilik bank campuran adalah Warga Negara asing atau perusahaan asing atau perusahaan asing dan warga Indonesia atau perusahaan dalam negeri, akan tetapi kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian – penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer uang keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan

transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi Bank Devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, Bank Non Devisa merupakan kebalikan daripada Bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas Negara.

Jenis bank dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, terbagi menjadi dua kelompok :

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam menentukan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat maupun balas jasa yang dibayar oleh masyarakat atas penghimpunan dana. Keuntungan yang diperoleh oleh bank konvensional yaitu dengan membebankan *fee* kepada nasabahnya. Balas jasa yang diberikan bank kepada pihak yang menempatkan dananya, bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan, maupun deposito di sisi lain, bank akan mendapat bunga atas pinjaman (kredit) yang diberikan kepada nasabah dan *fee* atas transaksi jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah

yang membutuhkan pelayanan jasa bank. Besarnya *fee* atas pelayanan jasa perbankan tergantung pada bank masing – masing dan dipengaruhi oleh kondisi persaingan antar bank.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan harga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh pihak bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah bank . perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut. Undang – Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

2. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut UU perbankan nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi utangnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian sederhana kredit merupakan dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa lain, kredit berasal dari kata “ *credere* ” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan akan dibayar.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

3. Jenis – jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain adalah sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi kegunaan

1). Kredit Investasi

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2). Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1). Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2). Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang diberikan, karena memang untuk digunakan atau diaplikasikan seseorang atau badan usaha

3). Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen – agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1). Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2). Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3(tiga) tahun, biasanya dipergunakan untuk kepentingan investasi.

3). Kredit Jangka Panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

d. Dilihat dari segi jaminan

1). Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang yang tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang telah diberikan oleh calon debitur.

2). Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atas nama baik calon debitur.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

- 1). Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan pertanian rakyat. Sector usaha pertanian dapat berupa kredit jangka pendek atau jangka panjang

- 2). Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang untuk kambing.
- 3). Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau industri besar.
- 4). Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak ataupun timah.
- 5). Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.
- 6). Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7). Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

4. Unsur – unsur Kredit

Pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika bicara tentang kredit, maka termasuk membicarakan tentang unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang dan jasa) akan benar-benar

diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ektern.

- b. Kesepakatan, di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing.
- c. Jangka waktu, setiap kredit yang telah diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet nya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit maka semakin besar pula risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja oleh nasabah dikarenakan kelalaian, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan yang diperoleh oleh bank. Sedangkan bagi pihak bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

5. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar – benar akan kembali. Adapun prinsip – prinsip pemberian kredit yaitu :

a. *Character* (Watak/Kepribadian)

Character atau watak dari calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang sangat penting dalam memutuskan pemberian pembiayaan/kredit. Bank sebagai pemberi pembiayaan harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu bersedia untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan ini sangat penting artinya bahwa mengingat kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atas penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha dari calon peminjam.

c. *Capital* (Modal)

Capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud struktur permodalan di sini adalah likuiditas dari modal yang sudah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai atau harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) ataukah sebagian dalam bentuk benda yang sukar diuangkan.

d. *Condition of Economics* (Kondisi Perekonomian)

Kondisi atau situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberi pembiayaan / kredit terutama dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon peminjam.

e. *Collateral* (jaminan atau agunan)

Collateral atau jaminan adalah benda milik debitur atau shahibul maal yang telah diikat sebagai tanggungan andai kita terjadi ketidakmampuan nasabah tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian akad pembiayaan

Penilaian dengan menggunakan prinsip 7P adalah sebagai berikut :

a. *Party*

Party disini yang dimaksud adalah mencoba menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut *character*, *capacity*, dan *capital* dengan jalan penilaian atas 3C tersebut.

b. *Purpose* (Tujuan)

Purpose yang dimaksud di sini adalah tujuan penggunaan pembiayaan yang telah diajukan, apa tujuan yang sebenarnya dari pengajuan pembiayaan tersebut. Selanjutnya bank kreditur (*mudharib*), harus meneliti apakah pembiayaannya benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan semula.

c. *Payment* (sumber pembayaran)

Setelah mengetahui tujuan yang sebenarnya dari pembiayaan tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan – kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai / dihasilkan. Dengan demikian bank dapat pula menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali pembiayaannya.

d. *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Yang dimaksud di sini bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh pihak bank.

e. *Protection* (Perlindungan)

Protection yang dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal – hal yang tidak di duga sebelumnya, maka bank perlu melindungi pembiayaan yang diberikannya dengan jalan meminta jaminan (*collateral*) dari debitunya, bahkan mungkin baik pembiayaan maupun jaminannya diasuransikan.

f. *Personality* (kepribadian)

Yaitu menilai dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun kepribadiannya di masa lalu.

g. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya

6. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Hasibuan (2007) dalam Bisri (2013), sumber dana bank sangat penting demi kelangsungan bank itu sendiri. Semakin banyak sumber dana yang diperoleh suatu bank, maka semakin besar pula keuntungan yang akan didapat. Dana bank adalah sejumlah uang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Ismail (2011) dalam Bisri (2013) berpendapat bahwa bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi 3, yaitu :

1). Dana Modal Sendiri (Dana Pihak Pertama)

Dana sendiri sering disebut juga dengan dana modal atau dana pihak I, merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank.

Menurut Kasmir (2002), merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham.

2). Dana Pinjaman dari Lembaga Lainnya (Dana Pihak Kedua)

Menurut Kasmir (2002), sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam mencari sumber dana pihak I dan pihak II. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

3). Dana dari Masyarakat (Dana Pihak Ketiga)

Dana pihak ketiga merupakan jasa yang ditawarkan oleh bank terhadap masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito. Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain adalah sebagai berikut :

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Simpanan giro ini dapat ditawarkan kepada seluruh masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha. Masyarakat sangat membutuhkan produk giro karena giro adalah uang giral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan sarana pemindahbukuan berupa bilyet giro.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (nasabah) pemegang rekening giro, biasanya bank juga memberikan fasilitas lainnya, seperti pinjaman *Overdraft* (cerukan), yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk menanggulangi apabila terjadi penarikan dana giro dengan menggunakan cek atau bilyet giro yang melebihi saldonya.

b. Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat

dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa dan sarana yang lainnya yang dipersamakan dengan itu. Meskipun demikian, bank masih mensyaratkan adanya saldo minimal dalam tabungan nasabah. Besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada kebijakan masing – masing bank. Saldo minimal digunakan sebagai cadangan apabila nasabah akan menutup rekening tabungannya.

c. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau diperjanjikan antara bank dengan nasabah. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Simpanan deposito memiliki jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat. Jika nasabah deposen menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jatuh tempo. Apabila nasabah deposen mencairkan uangnya sebelum jatuh tempo, maka deposen tersebut akan dikenakan denda (*penalty time*). Deposito dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

i). Deposito Berjangka (*time deposits*)

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998, jangka waktu deposito berjangka adalah mulai dari 1, 2, 3, 12, 18 sampai 24 bulan. Pemegang deposito berjangka akan mendapatkan bilyet deposito sebagai bukti hak pemiliknya. Deposito berjangka diterbitkan atas nama dan hanya dicairkan oleh pemegang hak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal valuta, tanggal dimana deposito tersebut telah dibuka.

ii). Sertifikat Deposito (*Certificate Of Deposits*)

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito diterbitkan tas unjuk, artinya di dalam sertifikat deposito tidak dicantumkan nama pemegang hak. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapapun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan dan dapat diperjualbelikan. Pembayaran bunga dilakukan pada saat

pembelian (bunga dibayar di muka). Berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jangka waktu sertifikat deposito mulai dari 2, 3, 6 sampai dengan 12 bulan.

iii). *Deposit On Call*

Deposit On Call adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit *Deposit On Call*. Dasar perceairannya sama dengan deposito berjangka, yaitu dengan mengembalikan bilyet *Deposit On Call* nya. *Deposit On Call* diterbitkan atas nama dan tidak dapat diperjualbelikan. Bunga nya dibayar pada saat pencairan *Deposit On Call* ini lebih sering dimanfaatkan oleh perusahaan karena termasuk simpanan jangka pendek, yaitu minimal 7 hari.

7. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

a. Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Achmad dan Kusno (2003) dalam Okta (2014) mengatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operaional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal.

Abdullah (2003) mengemukakan bahwa rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank antara sejumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. Untuk jelasnya Rasio Kecukupan Modal CAR dapat diformulakan sebagai berikut ini :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

ATMR

Dimana :

ATMR : Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

Dengan rasio CAR diketahui berupa modal minimum yang harus dicapai bank apabila Bank Sentral menetapkan standar CAR tertentu dan bank memiliki sejumlah ATMR. Hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan rasio kecukupan modal meliputi :

1). Dasar perhitungan kecukupan modal

Perhitungan kebutuhan modal di dasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang terentum dalam neraca maupun maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Terhadap masing – masing jenis aktiva tersebut

ditetapkan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot resiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan.

2). Menghitung ATMR

ATMR diperoleh dengan :

- a). Mengalikan nominal masing – masing pos aktiva neraca bobot masing – masing pos.
- b). Mengkonversi aktiva administratif ke dalam aktiva neraca yang menjadi padanannya. Besarnya faktor konversi masing – masing aktiva administrative didasarkan pada tingkat kemungkinan menjadi aktiva neraca yang efektif.
- c). Setelah mengkonversi aktiva administratif ke dalam aktiva neraca sebagai padanannya maka dilakukan perhitungan dengan jalan mengalikan hasil konversi dengan bobot resiko masing – masing aktiva administratif.
- d). Langkah terakhir dalam menghitung ATMR yaitu menjumlahkan semua perkalian nominal pos – pos aktiva neraca dengan bobot resiko (langkah b dan c)

b. Faktor yang mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Abdullah (2003), besar kecilnya kecukupan modal (CAR) sebuah bank dipengaruhi oleh tingkat kualitas management

bank yang bersangkutan, tingkat likuiditas yang dimilikinya, tingkat kualitas dari *assets*, struktur deposito, tingkat kualitas dari sistem dan prosedurnya, tingkat kualitas dan karakter para pemilik saham, kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek maupun panjang, serta riwayat pemupukan modal dan peraturan pembagian laba yang diperoleh.

8. *Non Performing Loan (NPL)*

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 8/30/DPBPR/2006 yang dimaksud dengan *Non Performing Loan (NPL)* adalah perbandingan antara kualitas kredit yang diberikan (kualitas lancar, diawasi dan macet) dengan jumlah kredit yang diberikan. *Non Performing Loan (NPL)* yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi resiko ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang akan menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasional sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba.

Kemacetan kualitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

a. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung rasio – rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.

b. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan dua hal, yaitu:

- 1.) Adanya unsur kesengajaan
- 2.) Adanya unsur tidak sengaja implikasi dari *Non Performing Loan* (NPL)

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 NPL dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit dalam Kualitas Kurang Lancar (Macet)}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Jumlah Kredit

Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat.

Hasil penelitian dari Prataa (2010), bahwa peningkatan atau penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit secara signifikan. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) akan berhasil dihimpun oleh perbankan, akan meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan, demikian pula sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hassanudin dan Prihatiningsih (2010), dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit BPR, jika dana pihak ketiga meningkat maka penyaluran kredit yang diberikan oleh BPR juga akan mengalami peningkatan.

Menurut Dendawijaya dan Pratama (2010), Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penyaluran kredit perbankan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan fungsi perantara keuangan (*financial intermediary*), Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber pendanaan utama. Dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang telah diperoleh.

2. Hubungan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dengan *Jumlah Kredit*

Menurut Abdullah (2003), apabila bank akan menambah penyaluran kredit kepada masyarakat, maka dengan sendirinya bank harus menambah modal yang dimilikinya, apabila bank tidak menambah jumlah kredit maka akan memperlancar *Current Adequacy Ratio (CAR)* yang akan dicapai.

Hasil penelitian dari Pratama (2010), menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan *Current Adequacy Ratio (CAR)* mempengaruhi kredit secara signifikan. Semakin rendah *Current Adequacy Ratio (CAR)* maka semakin besar pula jumlah kredit yang akan disalurkan. Tingginya *Current Adequacy Ratio (CAR)* mengindikasikan adanya sumber daya *financial* (modal) yang *idle*. Pulihnya perekonomian dan perbankan secara berangsur – angsur telah mendorong optimalisasi

kegunaan sumber daya *financial* (modal) melalui penyaluran kredit. Penyaluran kredit bank mengalami peningkatan seiring dengan penurunan *Current Adequacy Ratio* (CAR).

Hasil penelitian dari Satria (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko *Current Adequacy Ratio* (CAR) (kecukupan modal) bank maka kredit yang disalurkan semakin bertambah karena kecukupan modal merupakan syarat terpenting dalam mendukung ekspansi kredit yang lebih besar. Kecukupan modal dapat memberikan ruang gerak secara internal dan eksternal, karena dengan kecukupan modal pihak perbankan memenuhi syarat regulasi yang sangat aman.

Menurut Wibowo dalam Pratama (2010), semakin tinggi *Current Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar pula sumber daya *financial* yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai *Current Adequacy Ratio* (CAR) akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. *Current Adequacy Ratio* (CAR) di atas 20% perbankan bias memacu pertumbuhan kredit hingga 20% - 25% dalam setahun.

3. Hubungan *Non Performing Loan* (NPL) dengan Jumlah Kredit

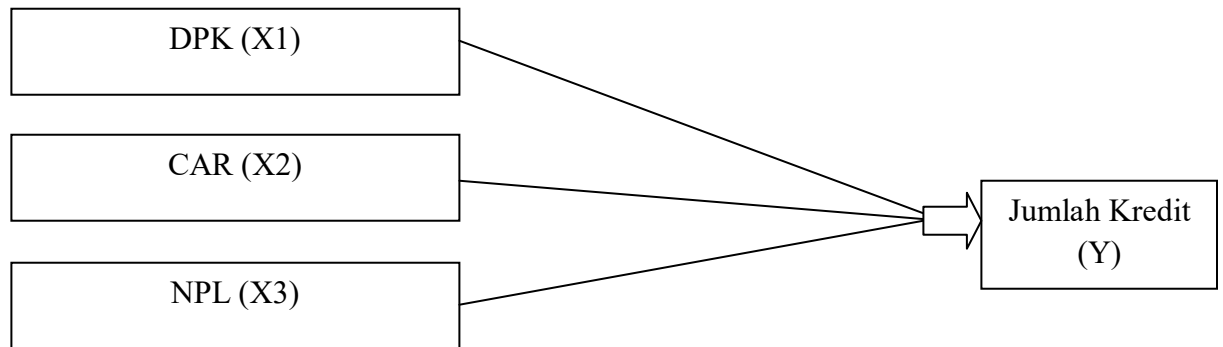
Rasio *Non Performing Loan* (NPL) yaitu perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin

besar tinggi rasio *Non Performing Loan* (NPL), maka menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya.

Penelitian pratama (2010) menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan *Non Performing Loan* (NPL) akan mempengaruhi penyaluran kredit. Semakin tinggi *Non Performing Loan* (NPL), akan mendorong penurunan jumlah kredit yang akan disalurkan, dengan demikian sebaliknya. Tingginya *Non Performing Loan* (NPL), akan meningkatkan premi risiko yang akan berdampak pada tingginya suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang terlampaui tinggi akan mengurangi permintaan masyarakat akan kebutuhan kredit. Tingginya *Non Performing Loan* (NPL) juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit, dengan demikian besarnya *Non Performing Loan* (NPL) menjadi salah satu penghambat tersalurnya kredit perbankan.

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai variabel dependen yaitu penyaluran kredit perbankan pada bank pemerintah di Indonesia Tahun 2007 – 2016. Sedangkan variabel independennya antara lain : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Current Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan suku bunga kredit. Untuk mempermudah konseptual dalam penulisan ini, digambarkan suatu kerangka yang sistematis sebagai berikut :



Sumber : Telaah Pustaka, 2017

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
DPK, CAR dan NPL Terhadap Jumlah Kredit

E. Hipotesis

Kuncoro (2013), hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Current Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan.

1. Diduga variabel Dana pihak ketiga akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit.
2. Diduga variabel *Current Adequacy Ratio* (CAR) akan berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.
3. Diduga variabel *Non Performing Loan* (NPL) akan berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.